

POLA KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh:

Serly Wulandari dan Sari Indah Murwani

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: serlywulandari.sw@gmail.com

ABSTRACT

One of administrative matters a choice in regional government administration is tourism. Where in the process of its development, the government provided room to the establishment of the cooperation based on the partnership principle that is needed each other, encourage each other and mutual benefit. To realize the partnership, need to the agreement and cooperation between local government, private and the community. Besides that there should have been planning, strategy and innovation in developing tourism sector regions, to improve economic conditions of regions and people.

This research using methods qualitative descriptive with inductive approach. Data collection techniques through interview, observation and documentation. Sources of data obtained from primary and secondary data. Informan is determined by the purposive sampling methods. The data was analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion.

The result showed that a partnership system in the development of tourism in purbalingga had run quite good but not optimal. It is based on the analysis of three essential principles of partnership and equality or equilibrium, transparency and mutual. A model of cooperation built by private companies and the government in the development of tourism in the model of pseudo partnership, or subordinate union of partnership. Of factors affect a partnership system in the development of tourism in Purbalingga was the rights and obligations of each party, the existence of the hope of gain, the meeting a period of time, the execution of a task and quality of service

Keywords: *partnership pattern, development, tourism*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: kelautan dan perikanan,

pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian serta transmigrasi”¹. Urusan pemerintahan pilihan tersebut dipilih dengan melihat potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja serta pemanfaatan lahan pada setiap daerah. Dimana dalam proses pengembangannya,

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat 3 Poin b

Pemerintah memberi ruang terbentuknya kerjasama yang berdasar pada prinsip kemitraan yaitu saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling memberi manfaat. Untuk mewujudkan kemitraan tersebut, perlu adanya kesepakatan dan kerjasama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat. Disamping itu perlu adanya perencanaan, strategi dan inovasi dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah, guna meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.

Kabupaten Purbalingga adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keunggulan dan keunikan di bidang industri dan pariwisata. Pada tahun 2016 saja terdapat 1,58 juta wisatawan yang datang ke Purbalingga untuk menikmati berbagai objek wisata. Jumlah tersebut menjadikan Purbalingga menempati posisi ke 4 jumlah wisatawan terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan, usaha pengembangan kepariwisataan tersebut juga didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2025. Adapun jenis pariwisata yang terdapat di Kabupaten Purbalingga sebagaimana terdapat pada tabel 1.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Purbalingga, dalam kenyataannya belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Sebagai contoh, di Desa Tanalum terdapat salah satu curug yang menarik dan potensial yakni Curug Aul. Namun, “untuk menuju Curug Aul dari permukiman penduduk terakhir berjarak sekitar 800 Meter. Nantinya untuk pengendara sepeda motor bisa sampai ke lokasi dekat Curug. Namun

untuk wisatawan yang menggunakan mobil hanya bisa memarkir kendaraan di lapangan Pucung Rumbak dan berjalan kaki sekitar 800 meter”².

Tabel 1

Jenis Objek Wisata di Kabupaten Purbalingga

NO	Jenis Objek Wisata	Nama Tempat Wisata
1	Wisata Buatan	Owabong, Pancuran Ciblon, Bobotsari, Pemandian Tirta Asri Walik serta Klawing Rafting Adventure
2	Wisata Edukasi	Objek Wisata Sanggaluri Park serta Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran
3	Wisata religi	Masjid Muhammad Chengho, Petilasan Syeh Jambu Karang, Masjid Agung Darussalam serta Makam Wali Perkasa
4	Wisata alam	Argo Wisata Lembah Asri Serang (Desa wisata Serang), Gua Lawa, Pendakian Gunung Slamet Pos Bambang, Desa Wisata Panusupan, Desa Wisata Tanalum serta Desa Wisata Limbasari
5	Wisata sejarah	Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman

Sumber: Kab. Purbalingga Dalam Angka 2017

Ditambah lagi, akses menuju Kabupaten Purbalingga baru didukung oleh transportasi darat saja, karena belum adanya transportasi udara yang sampai saat ini masih dalam tahap rencana pembangunan

2 Kabid Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Prayitno dalam (<https://phinemo.com/selfie-di-curug-aul-jadi-andalan-baru-wisata-purbalingga/>), diakses pada 20 November 2017 Pukul 16.15 WIB.

bandara komersil dan dibukanya *exit* tol Jakarta-Semarang di Pemalang. Lebih lanjut, kurangnya sarana dan prasarana dapat dilihat dari terbatasnya fasilitas penginapan, sehingga jumlah penginapan berbanding terbalik dengan wisatawan yang datang, baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Adapun jumlah akomodasi hotel di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Jumlah Akomodasi Hotel di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 dan 2015

Jenis Akomodasi	Tahun	Jumlah
Hotel/ Hotels	2014	12
	2015	13
Kamar/ Rooms	2014	281
	2015	279
Tempat Tidur/ Beds	2014	456
	2015	405

Sumber: BPS, Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel Jawa Tengah 2015

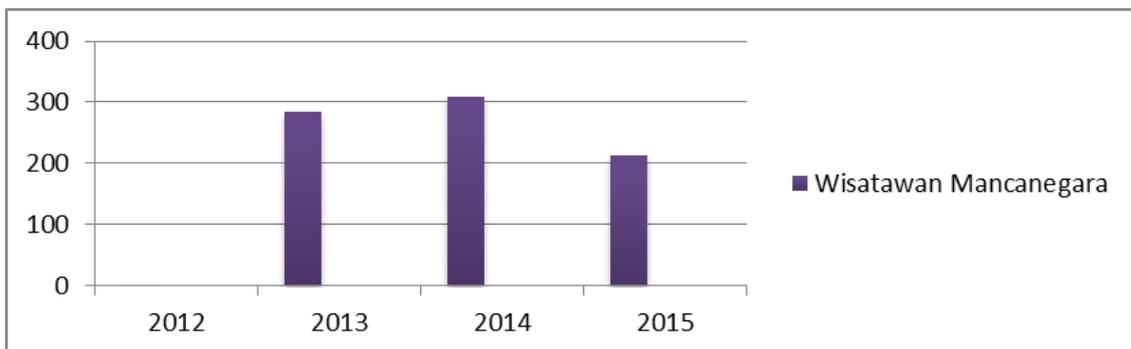
Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 tahun yakni tahun 2014 ke tahun 2015 hanya ada satu penambahan penginapan/hotel dari 12 menjadi 13, sedangkan jumlah kamar dan tempat tidurnya justru mengalami penurunan. Bahkan ada sebuah stigma tak tertulis “biar rekreasinya di Purbalingga tapi nginapnya tetap di Banyumas”. Hal ini tentu menjadi sebuah PR bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, agar bisa menarik wisatawan namun tetap menginap di Purbalingga.

Kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dapat menghasilkan pengembangan pariwisata yang optimal serta menguntungkan, sehingga perlu kesetaraan antara semua pihak yang saling bekerjasama/bermitra. Berdasarkan kasus dilapangan, “masyarakat yang berperan sebagai pegiat

wisata merasa pemerintah kurang dalam memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengelolaan dan pengembangan objek wisata, dikarenakan belum baiknya kerjasama pemerintah dengan pihak-pihak/lembaga yang menguasai bidang pariwisata”³. Lebih lanjut, berdasarkan data jumlah wisatawan mancanegara tahun 2012-2015, jumlah wisatawan mancanegara cenderung menurun atau tiap tahunnya mengalami fluktuatif. Sehingga diartikan bahwa promosi dan pemasaran objek dan daya tarik wisata dinilai belum efektif dan kreatif serta lambannya pengembangan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah kurang merespon pentingnya jaringan kerjasama pola kemitraan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang belum mengetahui potensi pariwisata di Kabupaten Purbalingga. Adapun data jumlah wisatawan mancanegara tahun 2012-2015 sebagaimana gambar 1.

Permasalahan-permasalahan dibidang pariwisata ini tentunya menjadi pemicu bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga untuk terus mengembangkan objek wisata yang dimiliki agar mampu meningkatkan pendapatan dan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Purbalingga. Sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih dalam hubungan kesinergian dan kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

3 Hasil Diskusi Pengembangan Desa Wisata dan Sosialisasi Sapta Pesona Sadar Wisata di Kampung Kurcaci, Desa Wisata Serang, Kecamatan Karangreja dalam (<http://purbalingganews.net/pegiat-desawisata-butuh-pendampingan-sdm-berkelanjutan/>), diakses pada 20 November 2017 Pukul 17.05 WIB.



Gambar 1
Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2015

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2017

RUMUSAN MASALAH

Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana model kerjasama yang dibangun pihak swasta dan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah?
3. Apa saja faktor – faktor yang memengaruhi pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah?

LANDASAN TEORI

Kemitraan

Sulistiyani menyatakan bahwa:

Kemitraan dilihat dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat

diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik⁴.

Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi beberapa persyaratan yakni, ada dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan dan saling membutuhkan. Disamping itu, terdapat tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu kesetaraan, transparansi dan saling menguntungkan sebagaimana uraian berikut:

⁴ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Grava Media: Yogyakarta, 2017), hlm.129

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*)

Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari *antagonism* perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

2. Transparansi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

3. Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat⁵.

Kemitraan memiliki beberapa model. Jika diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme yang di angkat ke dalam suatu pemahaman, model-model tersebut dibedakan sebagai berikut:

1. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan

semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan manfaatnya apa.

2. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain. Pemikiran kemitraan demikian ini diadopsi dari pola *simbiosis mutualisme* yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang.

3. *Cobjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "paramecium". Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi

5 Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR* (Gesik: Fascho Publishing, 2007), hlm.103

tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing⁶.

Lebih lanjut, model-model kemitraan juga dikembangkan berdasarkan azas kehidupan organisasi pada umumnya, yaitu:

1. *Subordinate union of partnership*

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. *Linear Union Of Partnership*

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relative. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/ volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. *Linear Collaborative Of partnership*

Kemitraan dengan melalui kerjasama linier. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/ legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi⁷.

Berdasarkan pengembangan mengenai keberhasilan suatu kemitraan, keberhasilan kemitraan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, “keberhasilan kemitraan *outsourcing* dilihat dari evaluasi antara tingkat pencocokan antara tujuan yang direncanakan dan hasil yang benar-benar tercapai. Evaluasi ini diperlukan sehubungan dengan empat dimensi kunci (1) adanya harapan akan keuntungan; (2) pertemuan jangka waktu; (3) Pelaksanaan tugas; (4) kualitas layanan”⁸.

Pengembangan Pariwisata

Pengembangan lebih menekankan kepada suatu proses atau suatu cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna⁹. Andrew dalam Sedarmayanti juga menjelaskan bahwa, “*development is a long-term educational process utilizing a systematic and organized procedure by which managerial*

6 Ambar Teguh Sulistiyani, *Op.Cit.*, hlm.130

7 *Ibid.*, hlm.131

8 Matilda, Alexandrova. IT Outsourcing Partnerships: Empirical Research on Key Success Factors in Bulgarian Organizations. Management, Vol. 17, 2012, 2, pp. 31-50. Journal of Contemporary Management Issues, within the cooperation with the Global Business Conference (<http://www.gbc-2012.com/>), Tahun 2012.

9 W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 474

*personel learn conceptual and theoretical knowledge for general purposes*¹⁰.

Pariwisata merupakan aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan¹¹. Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor penting tersebut antara lain:

1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu;
2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya;
3. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi;
4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut¹².

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

10 Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 164

11 A.J Muljadi & Andi Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8

12 Oka Yoeti, *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 118

PEMBAHASAN

Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga

Penelitian ini menggunakan teori kemitraan dari Wibisono, dimana terdapat 3 (tiga) dimensi yang menjadi prinsip penting dalam pola kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Ketiga dimensi tersebut akan dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator yang terdapat didalamnya sebagai berikut:

► Kesetaraan atau Keseimbangan

a. Saling Menghormati, Menghargai dan Percaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Taman Pendidikan Purbasari Pancuran Mas, Bapak Junjung, S.E dapat diketahui bahwa:

Sebagai bentuk rasa menghormati dan menghargai kepada masyarakat sekitar obyek wisata kami sering melakukan silaturahmi, komunikasi dan koordinasi dengan mereka. Contoh tarif parkir kami samakan dengan yang berada diluar obyek sehingga pengunjung tidak merasa dirugikan. Pedagang yang merupakan warga sekitar tidak kami tarik retribusi dan bagi masyarakat Desa Purbayasa diperbolehkan masuk obyek wisata secara gratis serta setiap sebulan sekali kami mengadakan pengajian untuk masyarakat Desa Purbayasa.

Wawancara juga dilakukan dengan manajer operasional objek wisata air bojongsari (owabong) sebagai salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Purbalingga, bapak Tonang yang mengungkapkan bahwa:

Sebagai rasa menghormati dan menghargai kami kepada masyarakat sekitar owabong kami selalu menjalin hubungan baik dengan mereka tidak hanya hubungan komunikasi saja yang baik juga disertai dengan tindakan. Semisal ada hajatan, kabar duka, atau kegiatan sosial lainnya kami siap sedia untuk membantu dan mendukung. Sehingga dampak dengan ramainya owabong tidak hanya dinikmati oleh perusahaan owabong saja melainkan warga sekitar. Selain itu karyawan yang bekerja dan penjual makanan sebagian besar merupakan warga Bojongsari.

Cara menghargai dan menghormati pihak swasta yang diwakilkan oleh Taman Pendidikan Purbasari Pancuran Mas dan Owabong kepada masyarakat, dilakukan dengan cara melakukan silaturahmi, komunikasi dan koordinasi. Melibatkan masyarakat sebagai pengelola, pengurus/karyawan dan pedagang didalam objek wisata, serta terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat sehingga dampak adanya obyek wisata juga dirasakan masyarakat baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi Industri dan Usaha Pariwisata Kabupaten Purbalingga, Ibu Suryani Kurniawati, S.H mengungkapkan bahwa,

“Agar hubungan saling menghormati terciptakan maka pemerintah melakukan pembinaan misal dalam hal pengawasan. Pada obyek usaha pariwisata kita datangi dan kita tanya untuk mendekatkan pemerintah dengan usaha pariwisata tersebut

kemudian pemerintah melakukan sosialisasi untuk berTDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)”.

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Desa Wisata Serang, Bapak Sugito, S.E yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk menciptakan keseimbangan dengan adanya pengembangan pariwisata yaitu dengan mengajak masyarakat khusus Desa Serang yang berpenghasilan rendah ikut bergabung di dalam kegiatan pariwisata di Desa Serang melalui investasi supaya mereka ada pendapatan dari kegiatan pariwisata di Desa Serang. Kita menjalin hubungan dengan masyarakat secara terbuka, jujur dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah desa maupun bumdes untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Serang. Karena kami basisnya pengembangan desa wisata melalui bumdes jadi apa di bahas melalui musyawarah desa sebagai bahan utama untuk mencapai tujuan. Selain itu pemerintah desa sering melaksanakan sosialisasi dan melakukan evaluasi kegiatan baik itu bulanan, kegiatan mendadak, ataupun akhir tahun. Bumdes sendiri juga memiliki pengawas. Sehingga masyarakatpun percaya akan kegiatan pariwisata”.

Sejalan dengan hal tersebut Masyarakat Desa Serang, Bapak Wahyu mengungkapkan bahwa,

“Sepengetahuan saya Desa Wisata Serang di kelola oleh pokdarwis dan bumdes. Mereka mengajak kami sebagai masyarakat ikut mengembangkan desa wisata dengan cara investasi dan penyewaan seperti

sewa tempat, kuda tunggang, dll. Kami selalu percaya karena selalu di sampaikan pada pertemuan, pokdarwis dan bumdes terbuka dan diawasi oleh badan pengawas”.

Saling menghormati, menghargai dan percaya yang nantinya akan menciptakan kesetaraan atau keseimbangan dalam kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di lakukan dengan cara dan teknik yang berbeda. Pihak swasta yang dalam pengelolaannya dilakukan sendiri tanpa ikut campur pemerintah tetap menghormati dan menghargai pemerintah dengan menaati segala peraturan yang ditetapkan pemerintah seperti halnya mendaftarkan usaha pariwisatanya kepada pemerintah untuk memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Walaupun belum semua melakukan hal tersebut, pemerintah sangat perhatian dengan mendatangi tempat-tempat usaha sekaligus sebagai pengawasan. Sedangkan kepada masyarakat, dengan cara melibatkan masyarakat dalam usaha pariwisata dan ikut terlibat didalam kegiatan sosial masyarakat.

b. Adanya penghargaan, Kewajiban dan Ikatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat Desa Wisata Tanalum, Bapak Taat Prianto diketahui bahwa:

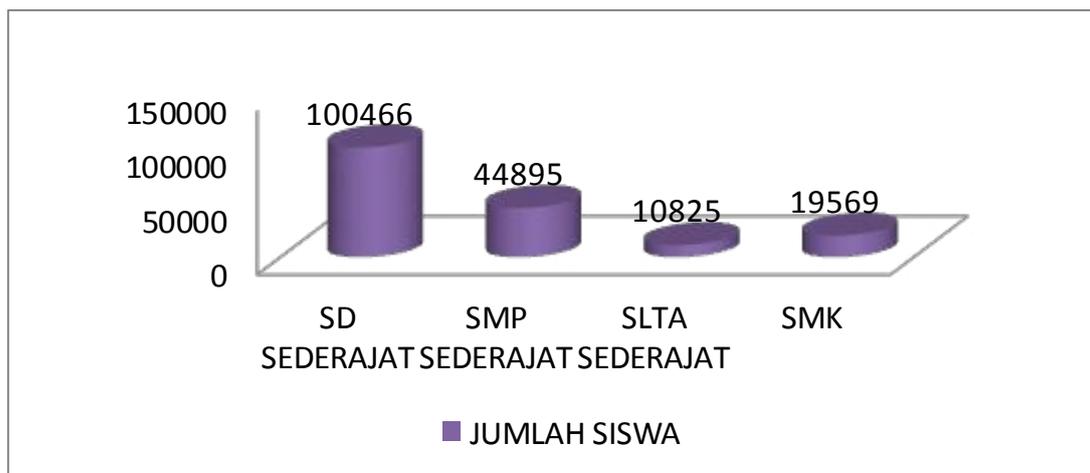
Hubungan dengan pemerintah saling sinergi karena dari dinas selalu melibatkan dan mengikutsertakan kami baik dalam pelatihan, *study banding*, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia. Sama halnya dengan masyarakat yang mengharuskan seluruh pengurus obyek wisata, dan pedagang adalah

warga Desa Tanalum. Timbal baliknya kami berkewajiban menjaga, melestarikan, membantu dan mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Tanalum misalnya mengikuti kerjabakti setiap minggunya dan ikut mempromosikan desanya sebagai destinasi wisata karena hasil penghasilan wisata akan dikembalikan kepada masyarakat untuk perbaikan jalan, dana musibah, dan menyuplai kesenian dll.

Selanjutnya Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, Bapak Drs. Mulyanto mengungkapkan bahwa:

Hubungan kerjasama yang diharapkan adalah *simbiosis mutualisme* yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Karena *multiplayer* pariwisata adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Kenyataannya belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia di masing-masing objek wisata. Padahal masing-masing pihak sudah tahu hak kewajibannya tetapi karena keterbatasan tingkat sosial, tingkat pendidikan, dll menjadikan ada yang tidak percaya diri untuk melaksanakan kewajibannya.

Keterbatasan sumber daya manusia dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar 2. Dari gambar 2 disimpulkan bahwa jumlah siswa berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan di tiap jenjang tingkatannya. Sehingga menyebabkan tingkat pendidikan tergolong rendah karena sebagian hanya bersekolah sampai tingkat



Gambar 2

Jumlah Siswa Tingkat SD, SLTP, SLTA dan SMK Kabupaten Purbalingga Tahun 2016/2017

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018

SD sederajat. Maka dari itu sumber daya manusia menjadi kurang berkualitas, mereka jadi kurang percaya diri dengan kemampuannya, sehingga kurang menjalankan kewajibannya sebagai pelaku pariwisata.

Sebagai bentuk ikatan yang dijalin antara pemerintah, swasta dan masyarakat agar jadi suatu kemitraan yang serasi atau seimbang maka dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga sebagai wakil dari pemerintah daerah dengan Wana Wisata Serang serta surat perjanjian kerjasama antara dinas dengan Petilasan Syeh Jambukarang.

Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, Bapak Drs. Kusmanto menjelaskan bahwa:

Kondisi kemitraan yang terjadi antara pemerintah daerah dan swasta di Kabupaten Purbalingga masih belum membuahkan hasil yang baik karena belum dilaksanakan secara maksimal.

Fakta dilapangan fasilitas di dalam wana wisata serang kurang baik dari gerbang utamanya saja sudah tidak terawat dan akses jalan didalam obyek rusak mereka berasalan tidak mau memperbaiki karena ada kaitannya dengan perhutani.

Selanjutnya Pengelola Taman Pendidikan Purbasari Pancuran Mas, Bapak Junjung S.E mengungkapkan bahwa,

“Kami berhasil meraih penghargaan juara pertama kategori daya tarik wisata yang dikelola swasta se-Jateng berupa penghargaan Abirawa Pariwisata tahun 2017. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menggerakkan industri pariwisata”.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sebagian besar sudah melaksanakan kewajibannya

masing-masing walaupun ada beberapa pihak yang belum melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Penghargaan yang diberikan dari masing-masing pihak dilakukan agar menciptakan hubungan kerjasama yang sinergi sehingga pengembangan pariwisata akan terus mengalami kemajuan. Sama halnya dengan ikatan yang telah dituangkan dalam surat perjanjian menjadikan salah satu upaya agar lebih mengikat secara formal dan menciptakan kesetaraan atau keseimbangan antar pihak yang terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan, kewajiban dan ikatan diatur dalam UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

► **Transparansi**

a. Pengelolaan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, Bapak Drs. Mulyanto yang mengungkapkan bahwa:

Pengelolaan informasi terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik, kami mengadakan pertemuan rapat dengan para pelaku wisata yang terdiri dari pengelola wisata, pemilik hotel, pokdarwis, biro perjalanan wisata, dan organisasi pariwisata di Kabupaten Purbalingga. Dimana dalam pertemuan itu kami melakukan pembahasan mengenai pengembangan destinasi pariwisata, pengelolaan sumber daya manusia, promosi pemasaran pariwisata serta industri usaha pariwisata. Dari provinsi juga selalu mengikutsertakan kami dalam pertemuan/rapat dan kegiatan

kepariwisataan. Selain itu pengelolaan informasi disampaikan melalui media elektronik dan media cetak dan juga melalui bantuan dinas komunikasi informasi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Wisata Serang, Bapak Sugito, S.E bahwa,

“Selain pertemuan rapat yang diadakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga kami juga melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan BPD Desa Serang setiap 3 bulan sekali. Penyampaian informasi terkait Desa Wisata Serang kepada publik juga dilakukan melalui media sosial, website, *buflate*, media cetak lainnya, dll”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pengelola Taman Pendidikan Purbasari Pancuran Mas, bapak Junjung, S.E menyatakan bahwa:

Penyampaian Informasi yang kami lakukan di dalam obyek wisata dengan memanfaatkan CC TV dan HT untuk memantau kebersihan dan keamanan sekaligus menginformasikan sesuatu hal baik kepada pengunjung maupun karyawan, apabila diluar obyek wisata yaitu kepada publik dan pemerintah kami memanfaatkan media elektronik dan cetak selain itu pemerintah juga selalu melibatkan kami dalam rapat pertemuan yang diadakan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tentunya dalam pembahasan yang terkait dengan pariwisata.

Wawancara juga dilakukan dengan wisatawan nusantara dari Kabupaten Banjarnegara, saudari Rubiyanti yang mengatakan bahwa,

“Informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Purbalingga saya mengetahui dari media elektronik”.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi yang dilakukan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga adalah melalui pertemuan, rapat, media elektronik, dan media cetak.

b. Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, Bapak Drs. Kusmanto dapat diketahui bahwa:

Pengelola keuangan terletak dimasing-masing destinasi pariwisata, untuk objek wisata yang berada dibawah dinas langsung seperti Petilasan Ardilawet, Buper Munjuluhur, Goa Lawa, Monumen Tempat Kelahiran Jendral Soedirman dll pendapatannya langsung masuk ke kas daerah dan dinas hanya menerima laporan jumlah pendapatan sehingga pengelolaan keuangannya transparansi karena langsung masuk ke kas daerah. Pendapatan yang masuk ke kas daerah digunakan untuk membayar gaji tenaga harian lepas dan pemeliharaan tentunya sesuai ketentuan yang ada. Dinas juga menyusun anggaran kegiatan pengelolaan obyek wisata bagi obyek wisata yang dikelola dinas.

Hal serupa juga disampaikan oleh Manajer Operasional Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong), Bapak Tonang yang menyampaikan bahwa:

Pengelolaan keuangan di Owabong dilakukan sendiri yaitu pada bagian keuangan, karena owabong adalah perusahaan daerah jadi segala pengelolaannya di sampaikan dan dilaporkan ke daerah. Kami juga di bawah badan pengawas. Hierarkinya dari bupati ke badan pengawas kemudian direktur, jadi dalam pengelolaan keuangan kami transparan karena diaudit oleh badan pengawas. Hasil pendapatan disetorkan ke pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah yang sudah ditargetkan pemerintah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pokdarwis Desa wisata Tanalum, Bapak Fatah mengatakan bahwa

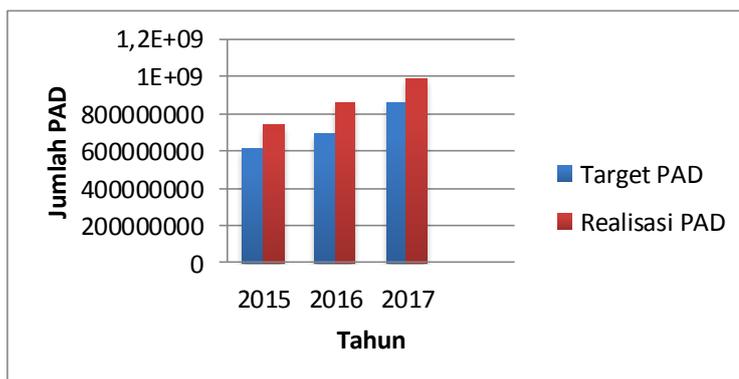
Pengelolaan keuangan dilakukan secara umum oleh pokdarwis tetapi dimasing-masing obyek wisata ada pengelolanya sendiri dari hasil pendapatan yang diperoleh dibagi hasil untuk desa, pengelola, pokdarwis, asuransi dan dana sosial. Tidak ada setor ke pemerintah daerah karena kami berbasis pemberdayaan masyarakat. Rincian keuangan disampaikan pokdarwis dalam rapat desa bersama BPD sehingga masyarakat mengetahuinya tanpa menimbulkan kecurigaan. Jika ada masyarakat yang menanyakan kami siap menjelaskannya lagi karena tidak ada yang ditutup-tutupi.

Disamping itu, hasil wawancara dengan pengelola Taman Pendidikan Purbasari Pancuranmas, Bapak Junjung, S.E mengungkapkan bahwa

“Karena kami swasta jadi tidak ada campur tangan pemerintah dalam mengelola keuangan hanya saja kami diwajibkan membayar pajak”.

Pengelolaan keuangan pada kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dilakukan secara transparan karena pengelolaan dilakukan oleh masing-masing objek wisata. Untuk objek wisata yang dikelola oleh Dinas dan perusahaan daerah harus menyetorkan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga sebagai hasil sumber pendapatan asli daerah, obyek wisata yang dikelola oleh swasta wajib menyetorkan pajaknya sedangkan desa wisata tidak diwajibkan untuk menyetorkan hasil pendapatannya ke kas daerah karena mereka berbasis pemberdayaan sehingga hasil yang diperoleh untuk kas desa.

Jumlah pengunjung obyek wisata yang meningkat tiap tahunnya yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berpengaruh pada peningkatan jumlah pendapatan asli daerah di bidang pariwisata, sebagaimana dijelaskan dalam gambar 3 berikut:



Gambar 3

Target PAD Bidang Pariwisata dan Realisasi PAD Bidang Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 s.d 2017

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018

► Saling Menguntungkan

a. Membawa Manfaat bagi Semua Pihak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, Bapak Drs. Mulyanto dapat diketahui bahwa:

Manfaat yang dirasakan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga banyak salah satunya yaitu pengunjung obyek wisata meningkat sehingga memengaruhi peningkatan pendapatan di bidang pariwisata. Pemerintah merasa terbantu dengan sinerginya antara swasta dan masyarakat yang berperan dalam melaksanakan program pariwisata dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Dari gambar 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2017 jumlah realisasi PAD bidang pariwisata melampaui target PAD bidang Pariwisata yang sudah ditetapkan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini membuktikan manfaat dari hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat membuahkan hasil karena berpengaruh pada jumlah pengunjung obyek wisata dan pendapatan asli daerah di bidang pariwisata.

Manfaat yang dirasakan juga diungkapkan oleh pengelola Taman Pendidikan Purbasari Pancuran Mas, Bapak Junjung, S.E sebagai keterwakilan dari pihak swasta yang mengungkapkan bahwa:

Kami merasa terbantu dengan adanya hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, walaupun hasil pendapatan kami tidak disetorkan untuk PAD tetapi pemerintah daerah tetap memfasilitasi kami seperti memperbaiki akses jalan, penerangan berupa lampu jalan, mempromosikan kita disetiap event dan kegiatan serta mendapat pelatihan kepariwisataan.

Masyarakat sebagai salah *satu stakeholder* juga mendapatkan manfaat karena dalam suatu kemitraan/kerjasama harus saling menguntungkan. Dengan adanya kemitraan ini masyarakat mendapat keuntungan khususnya dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Serang, saudari Wati yang mengungkapkan bahwa, “manfaat yang saya rasakan bisa mendapat penghasilan dari sini dengan berjalan”.

Dampak yang harus diperoleh dari hubungan kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat yaitu membawa manfaat bagi semua atau saling menguntungkan. Pemerintah diuntungkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah melebihi target yang sudah ditetapkan, swasta mendapat manfaat dengan memperoleh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sehingga jumlah pengunjung obyek wisata meningkat. Serta masyarakat mendapat manfaat berupa tersedianya lapangan kerja di bidang pariwisata, dan dampak ekonomi lainnya.

Model Kerjasama yang Dibangun Pihak Swasta dan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata selalu mengikutsertakan dan mengajak pihak swasta dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga antara lain dengan mengundang pada rapat pertemuan, sosialisasi, pelatihan, promosi dan pemenuhan fasilitas aksesibilitas walaupun swasta tidak menyetorkan hasil pendapatannya kepada pemerintah. Timbal balik yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga yaitu kunjungan wisatawan meningkat dan PAD bidang pariwisata melampaui target setiap tahunnya, bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang akan memengaruhi perekonomian masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Keuntungan yang diperoleh swasta tidak sepenuhnya menjadikan swasta menaati segala peraturan pemerintah karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa usaha pariwisata yang belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata sehingga dari pihak pemerintah harus mendatangi usaha tersebut untuk mensosialisasikan dan memberi informasi agar segera memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Sumber daya manusia yang rendah juga berpengaruh di bidang pariwisata yaitu mereka kurang percaya diri akan kemampuannya sehingga kurang menjalankan kewajibannya sebagai pelaku pariwisata. Pelaksanaan kewajiban juga belum dilaksanakan dengan baik pada obyek wisata Wana Wisata Serang walaupun sudah terikat secara formal

dalam surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan PT Palawi Risorsis.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Sulistyani, jika diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme maka model kerjasama yang dibangun antara pihak swasta dan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam model *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu. Dimana dalam kemitraan semacam ini, kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami manfaat dari substansi yang diperjuangkan. Sedangkan jika dilihat dari azas kehidupan organisasi pada umumnya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam model *Subordinate union of partnership* dimana kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih tidak seimbang satu sama lainnya. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah, sehingga tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

Faktor yang Memengaruhi Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan teori Alexandrova yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kemitraan maka dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

a. Adanya harapan akan keuntungan

Setelah komunikasi terjalin yaitu antara pemerintah daerah, swasta

dan masyarakat maka kemitraan akan berjalan karena masing-masing pihak merasa saling membutuhkan. Tujuannya agar masing-masing dari mereka memperoleh keuntungan, karena salah satu prinsip kemitraan yang diungkapkan Wibisono adalah saling menguntungkan. Masing-masing pihak memiliki kelebihan yang akan mendukung pihak lain untuk berkolaborasi, dan hubungan kerjasama yang diharapkan adalah *simbiosis mutualisme* yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Untuk mendapatkan keuntungan maka kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dilaksanakan dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi penelitian di lapangan peneliti memperoleh data bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga semakin maju ditandai dengan bertambahnya destinasi wisata baru dan atau desa wisata, budaya dan festival tradisional semakin tahun semakin berkembang dengan menggali adat istiadat lama, fasilitas jalan mendukung 78% dalam kondisi baik karena pemerintah melakukan pelebaran jalan, dan masyarakat sudah mulai terbiasa menerapkan sapa pesona menjadi suatu kebiasaan.

Dengan kolaborasi saling menguntungkan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata maka mereka akan terus bermitra untuk saling melengkapi satu sama lain.

b. Pertemuan jangka waktu

Pertemuan jangka waktu disini adalah komunikasi. Berjalan tidaknya kemitraan tergantung bagaimana menjalin komunikasi dengan masing-masing pihak sehingga dapat menyatukan jalan pemikiran untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Komunikasi yang dilakukan oleh pelaku pariwisata terhadap pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik dijalin melalui pengelolaan informasi berupa pertemuan/rapat, informasi melalui media elektronik maupun media cetak, dll.

Berdasarkan observasi penelitian di lapangan, peneliti mengamati antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat melaksanakan diskusi berupa rapat yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dengan melibatkan para pelaku pariwisata. Rapat diskusi tersebut rutin dilaksanakan membahas pariwisata di Kabupaten Purbalingga, sehingga mereka saling bermitra satu sama lain untuk dapat mengembangkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga agar semakin baik. Dengan komunikasi akan menumbuhkan komitmen bersama dalam menjalin kemitraan yang kuat untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Apabila komunikasi tidak berjalan baik maka kemitraanpun tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan sehingga komunikasi sangat memengaruhi dalam menjalin hubungan antara pemerintah daerah,

swasta dan masyarakat dalam bermitra mengembangkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

c. Pelaksanaan tugas

Setelah komunikasi terjalin antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat maka kemitraan akan berjalan karena masing-masing pihak merasa saling membutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Masing-masing pihak memiliki tugas yang akan mendukung pihak lain seperti tugas pemerintah daerah dalam memberikan sarana atau fasilitas pendukung pariwisata, memperbaiki kualitas SDM pariwisata misal melalui pelatihan, pengelolaan sumber daya keuangan, dll. Tugas swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan di bidang pariwisata dari modal yang dimiliki sendiri dan tugas masyarakat berupa sumber daya pelaksana dan dukungan dalam mengelola dan mengembangkan suatu destinasi pariwisata. Dari tugas masing-masing pihak dapat saling melengkapi dan ada timbal balik yang diperoleh dari pihak lain baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian di lapangan peneliti memperoleh data bahwa pelaksanaan tugas masing-masing pihak dilapangan belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terdapat pihak yang tidak percaya diri, rendahnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan kelalaian masing-masing yang disebabkan keterbatasan sumber daya manusia

dan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.

d. Kualitas layanan

Penyediaan layanan menjadi tugas masing-masing pihak yang merupakan salah satu faktor dalam pelaksanaan kemitraan. Pelayanan yang dimaksud ialah pelayanan wisata yang memadai dan mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung. Pemerintah menyediakan sarana transportasi dan jalandalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga dengan berupaya memperbaiki dan melakukan pelebaran jalan menuju daerah destinasi pariwisata. Walaupun belum seluruhnya terjamahi untuk destinasi pariwisata yang tempatnya sulit dijangkau. Adanya program becak wisata dan terminal khusus bus pariwisata yang didukung dengan tersedianya anggaran dana untuk pengembangan pariwisata. Swasta menyediakan layanan berupa usaha pariwisata dan wajib mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Namun, pelaksanaan dilapangan masih rendah kesadaran sehingga pemerintah harus mendatangi dan mensosialisasikannya lagi.

Disamping faktor-faktor tersebut diatas berdasarkan hasil penelitian baik wawancara, observasi, dokumentasi dan disatukan dalam triangulasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan terdapat faktor lainnya, yaitu:

e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak

Hak dan kewajiban masing-masing pihak akan memengaruhi hubungan kemitraan yang dijalin dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga dikarenakan masing-masing pihak harus tahu apa yang harus dilakukannya dan apa yang harus didapatkannya di dalam proses bermitra. Dalam hal ini pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk hubungan kemitraan yang dijalin diantara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari masing-masing keterwakilan pihak pemerintah daerah, swasta dan masyarakat diketahui bahwa kewajiban Pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata yaitu memberikan sarana dan fasilitas pendukung pariwisata, memperbaiki kualitas SDM pariwisata seperti mengadakan pelatihan, dll. Haknya memperoleh PAD yang meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Kewajiban swasta yaitu membayar pajak, menciptakan lapangan pekerjaan dibidang pariwisata dari modal yang dimiliki sendiri. Haknya yaitu memperoleh keuntungan dalam usahanya. Masyarakat berkewajiban menjaga, melestarikan, membantu dan mendukung pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Haknya memperoleh lapangan pekerjaan di bidang pariwisata dan dampak positif yang diperoleh dari keuntungan suatu destinasi pariwisata berupa

peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan uraian dimensi-dimensi berikut:
 - a. Kesetaraan atau Keseimbangan, ditandai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat yang belum seimbang, padahal hak dan kewajibannya sudah diketahui oleh masing-masing pihak. Hal tersebut disebabkan masih ada pihak yang tidak percaya diri, rendahnya pemahaman karena keterbatasan sumber daya manusia serta tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.
 - b. Transparansi, baik dalam pengelolaan informasi yang disampaikan melalui pertemuan/ rapat, media elektronik dan media cetak, maupun pengelolaan keuangan karena dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban serta diawasi langsung oleh pengawas dan masyarakat.
 - c. Saling menguntungkan, dimana Pemerintah daerah diuntungkan dengan peningkatan PAD yang melampaui target ditetapkan.

Swasta memperoleh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sehingga jumlah pengunjung obyek wisata meningkat. Masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan dan penghasilan.

2. Model kerjasama yang dibangun pihak swasta dan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam model *Pseudo partnership* atau kemitraan semu jika ditinjau dari fenomena biologis kehidupan organisme. Sedangkan jika ditinjau dari azas kehidupan organisasi pada umumnya, termasuk dalam model *Subordinate union of partnership* yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak, adanya harapan keuntungan, pertemuan jangka waktu, pelaksanaan tugas, dan kualitas layanan.

Saran

Peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar pola kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah berjalan lebih baik dari sebelumnya, maka sebaiknya:
 - a. Meningkatkan sumber daya manusia dan tenaga ahli bidang pariwisata di Kabupaten Purbalingga;

- b. Dibutuhkan peraturan pelaksana yang mengatur tentang kemitraan dalam pengembangan pariwisata;
 - c. Meningkatkan fasilitas aksesibilitas seperti jalan di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata termasuk daerah yang sulit dijangkau dan menyediakan sarana peribadatan untuk semua pemeluk agama.
2. Agar model kerjasama yang dibangun pihak swasta dan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga menjadi seimbang, maka sebaiknya:
 - a. Meningkatkan kesadaran pihak swasta dalam usaha pariwisata untuk memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata melalui sosialisasi;
 - b. Meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban masing-masing pelaku pariwisata.
 3. Untuk mencapai keberhasilan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, maka:
 - a. Upaya pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan memanfaatkan bandar udara wirasaba sebagai tempat promosi dan pemasaran mengenai potensi pariwisata Kabupaten Purbalingga;
 - b. Meningkatkan pertunjukan kebudayaan dan festival tradisional sebagai salah satu potensi yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muljadi, A.J, Andi Warman. 2014. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Grava Media.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Yoeti, oka. 2008. *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, Dan Implementasi*. Jakarta. Kompas.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2025.

Sumber Lain

- Alexandrova, Matilda. 2012. IT Outsourcing Partnerships: Empirical Research on Key Success Factors in Bulgarian Organizations. *Management*, Vol. 17, 2012, 2, pp. 31-50. *Journal of Contemporary Management Issues*, within the cooperation with the Global Business Conference (<http://www.gbc-2012.com/>).

Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2017.

Sumber:(<https://phinemo.com/selfie-di-curug-aul-jadi-andalan-baru-wisata-purbalingga/>), diakses pada 20 November 2017 Pukul 16.15 WIB.

Sumber:(<http://purbalingganews.net/pegiat-desawisata-butuh-pendampingan-sdm-berkelanjutan/>), diakses pada 20 November 2017 Pukul 17.05 WIB.